

**JUAL BELI MAKANAN DI KEDAI TANPA PENCANTUMAN HARGA
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI
PADA KEDAI ABDULLAH GORO ASSALAM KEC. KARTASURA KAB.
SUKOHARJO)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

QONITA SABILAH HAQ

I 000 160 060

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUAL BELI MAKANAN DI KEDAI TANPA PENCANTUMAN HARGA DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA KEDAI
ABDULLAH GORO ASSALAM KEC. KARTASURA KAB. SUKOHARJO)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

QONITA SABILAH HAQ

I 000 160 060

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Yayuli. S. Ag., MPI

NIDN. 0612056404

HALAMAN PENGESAHAN

JUAL BELI MAKANAN DI KEDAI TANPA PENCANTUMAN HARGA DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA KEDAI
ABDULLAH GORO ASSALAM KEC. KARTASURA KAB. SUKOHARJO)

OLEH

QONITA SABILAH HAQ

I000160060

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 15 Desember 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Yayuli. S. Ag., MPI.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Lukman Hakim. Lc., M. H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Azhar Alam. S.E.Lc., M. SEL.
(Anggota II Dewan Penguji)

()

()

()



Dekan,


Dr. Syamsul Hidavat., M.Ag.

NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 November 2020

Penulis



QONITA SABILAH HAQ
1000160060

**JUAL BELI MAKANAN DI KEDAI TANPA PENCANTUMAN HARGA
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI
PADA KEDAI ABDULLAH GORO ASSALAM KEC. KARTASURA KAB.
SUKOHARJO)**

Abstrak

Mu'malah merupakan bidang Islam yang sangat luas untuk dikaji dan juga erat kaitannya dengan berbisnis dan berniaga. Dalam membeli makanan, masyarakat lebih memilih tempat yang menyediakan banyak menu dan harga yang terjangkau. Kedai Abdullah adalah salah satu rumah makan yang banyak diminati oleh pembeli. Namun, pada kenyataannya jual beli makanan tersebut di jual tanpa adanya pencantuman harga. Dapat dikatakan bahwa jual beli semacam ini mengandung unsur penyamaran, karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli sehingga berakibat batalnya akad karena tidak tercapai unsur-unsur kerelaan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 29 KHES bahwa akad yang sah sebagaimana di maksud dalam pasal 26 huruf (a) adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. Hal tersebut dapat menimbulkan kekecewaan pada pembeli terutama bila harga yang harus dibayarkan ternyata jauh dari yang diperkirakan, pembeli juga merasa dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai unsur kerelaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga di Kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, apa saja faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga di kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dan bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem jual beli makanan di kedai Abdullah, untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga makanan di kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dan untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap jual beli makanan di kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) data primer dikumpulkan dari wawancara. Penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penulis mengambil populasi yang tersedia yaitu sebanyak 3 orang yaitu pelanggan kedai Abdullah dan 1 orang pemilik kedai Abdullah. Pengolahan data dilakukan melalui editing, dan sistematisasi data analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan tanpa

pencantuman harga dalam kompilasi hukum ekonomi syariah diperbolehkan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 78 KHES yang berbunyi beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad dalam huruf (a). Masalah tersebut tidak mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal, karena transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dihindari dan sudah memiliki dasar suka sama suka. Karena sudah menjadi kebiasaan dan memiliki dasar suka sama suka maka hal tersebut diperbolehkan asal tidak melanggar ketentuan hukum syar'i.

Kata kunci: jual beli, faktor, sistem, latar belakang, harga, hukum islam.

Abstract

Mu'amalah is a very broad field of Islam to study and also closely related to doing business and trading. In buying food, people prefer places that provide many menus and affordable prices. Kedai Abdullah is one of the restaurants that is in great demand by buyers. However, in reality the food is bought and sold at sell without price quotation. It can be said that buying and selling of some kind it contains an element of disguise, due to the lack of deep price transparency implementation of the sale and purchase resulting in the cancellation of the contract because elements were not achieved willingness element. As explained in article 29 KHES that the contract valid as referred to in article 26 letter (a) is the contract that was agreed upon in the agreement, does not contain elements of ghalath or error, done below ikrah or coercion, taghrir or hoax, and ghubn or disguise. That matter It can cause frustration to buyers especially when the price has to be paid was far from what was expected, the buyer also felt disadvantaged so that in the sale and purchase the element of willingness is not achieved. The problem in this research is how to carry out buying and selling food in restaurants without price inclusion at Kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, what are the factors behind the exclusion of prices at Abdullah Goro Assalam shop, Kec. Kartasuran Kab. Sukoharjo and how to review the compilation of sharia economic law on the sale and purchase of food without price inclusion at Abdullah Goro Assalam shop, Kec. Kartasuran Kab. Sukoharjo. The purpose of this study was to determine the system of buying and selling food at Abdullah's shop, to determine the factors behind the exclusion of food prices at Abdullah Goro Assalam's shop, Kec. Kartasuran Kab. Sukoharjo and to find out the compilation of sharia economic law on food buying and selling at Abdullah Goro Assalam shop, Kec. Kartasuran Kab. Sukoharjo. This research is classified as field research (field research). Primary data were collected from interviews. The author uses a purposive sampling technique, namely the sampling technique of data sources with certain considerations. The author takes the available population, namely 3 people, namely the customer of Abdullah's shop and 1 of the owner of the

Abdullah shop. Data processing was done through editing and systematization of data analysis done qualitatively with deductive thinking method. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of selling buy food without price inclusion in the compilation of sharia economic laws allowed. As stated in article 78 KHES which reads several things that are included in the sale and purchase, even if not specified firmly in the contract in letter (a). The problem does not result in the sale and purchase being canceled, because of the transaction it has become a community habit that is difficult to avoid and already has a consensual basis. Because I have become a habit and have a consensual basis then this is allowed as long as it is does not violate the provisions of syar'i law.

Key word: buy and sell, factors, system, background, islamic law.

1. PENDAHULUAN

Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan mencakup secara keseluruhan. Berisikan keseluruhan aspek kehidupan. Hubungan manusia dengan penciptanya masuk dalam bidang ibadah, sedangkan pada manusia dengan manusia masuk pada bidang mu'amalah. Bentuk mu'amalah yang terjadi pada manusia adalah jual beli. Jual beli sendiri adalah suatu persetujuan antara pihak satu mengikatkan diri dengan menyerahkan suatu benda kepada pihak lain dan dibayarkan sesuai harga yang disepakati. Bisa dikatakan bahwa jual beli terjadi antara dua orang atau lebih yang sedang menjalani transaksi dengan dasar dan syarat rukun yang sudah ada. Dalam Qur'an surat An-nisa ayat 29 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29).

Dijelaskan bahwa pada ayat diatas, Islam membolehkan adanya jual beli menggunakan prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan hokum Islam, yang didalamnya tidak mengandung riba, gharar, maisir, dan lainnya yang dilarang syariat Islam. Kegiatan jual beli harus didasari suka salingsuka dan tidak merugikan salah satu pihak, karena jual beli adalah kegiatan nyata yang pasti dilakukan manusia dengan manusia lainnya.

Sebagaimana Hadits yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaiberikut :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela.”(HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)”

Islam mengatur bahwa jual beli harus sesuai dengan hokum Islam yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW . Perkembangan dalam jual beli yang terus mengalami perkembangan, membuat para konsumen harus lebih teliti dalam melakukan kegiatan jual beli. Hal ini dikarenakan adanya pelaku jual beli yaitu penjual dan pembeli sehingga pada implementasinya mengharuskan ketrebukaan harga supaya konsumen dapat mengetahui langsung harga barang tersebut. Transparansi sendiri dimaksudkan bahwa akad yang akan dilakukan sesuai dan memiliki nilai tanggung jawab dari para pihak secara terbuka.

Dalam pelaksanaan jual beli sangatlah beragam, salah satunya produk makanan. jenis-jenis pada makanan pun beragam, mentah hingga matang, siap antar sampai tujuan tanpa terbebani biaya ongkos kirim atau santap ditempat. Istilah tempat yang memperjual belikan makanan pada umumnya disebut dengan rumah makan, warung makan, restoran atau kedai. Saat ini istilah yang ramai digunakan yakni kedai karena mudah di ucap, kekinian dan kesannya sangat unik. Kedai sangat mudah kita temukan diberbagai tempat khususnya di kota Solo ini.

Di daerah Kec. Sukoharjo khususnya di sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta banyak sekali Kedai. Tetapi dalam kesempatan kali ini penulis hanya melakukan penelitian pada Kedai Abdullah Goro Assalam saja. Di Kedai Abdullah Goro Assalam sangatlah unik dengan macam varian menu yang banyak, kekinian dan pastinya mengenyangkan. Kedai Makan tersebut memiliki letak yang strategis dan unik cara pelayanan serta pembayarannya. Namun, dalam pelaksanaan jual beli di kedai tersebut terdapat keganjalan yakni kurangnya transparansi harga karena di kedai tersebut tidak mencantumkan harga terdaftar menu yang dijualnya. Seharusnya dalam transaksi jual beli diharuskan ada transparansi harga menu yang dijualnya dengan tujuan supaya pembeli bisa mengetahui langsung harga barang yang hendak dibelinya. Namun disisi lain tersebut Kedai Makan ini menggunakan cara bayar seikhlasnya.

Dalam pelaksanaannya, pengunjung yang akan membeli makanan di kedai tersebut justru langsung dipersilahkan untuk memilih sendiri menu makanan yang diinginkan. Setelah pengunjung selesai menyantap makanannya, kemudian pengunjung melakukan transaksi atau pembayaran. Namun pembayaran di kedai tersebut sangatlah unik yakni tidak adanya kasir tetapi pengunjung dipersilahkan memasukkan uang pada kotak yang disediakan karena Pembayaran menggunakan konsep bayar seikhlasnya.

Disebutkan pada pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad yang sah pada pasal 26 huruf a memenuhi unsur akad yang telah disepakati pada sebuah perjanjian, didalamnya tidak mengandung ghalath atau khilaf, tidak dalam ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. Apabila saat pelaksanaan tidak mencapai unsur suka saling suka atau saling rela dikarenakan tidak adanya transparansi dalam bertransaksi khususnya harga, sehingga mengakibatkan pembatalan akad dikarenakan tidak tercapai unsur kerelaan diantara kedua pihak. Karena itu, nilai syariat Islam mengajak umat muslim supaya bisa mempraktikan atau menerapkan konsep ta'sir atau penetapan

harga dalam aktivitas perekonomian, yakni dengan adanya penetapan harga pada barang yang diperjualbelikan.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis berargumen kuat bahwa dalam penjabaran diatas dapat menjadi latar belakang penyusunan untuk melakukan penelitian di Kedai Abdullah Goro Assalam di Kab. Sukoharjo, karena kedai tersebut ramai dikunjungi berbagai macam pengunjung, dan jual beli tersebut tergolong jual beli yang kurang transparan karena dalam daftar menu tidak dicantumkan harga tetapi dengan cara pembayaran seikhlasnya. Adapun sebab yang lain yakni pemilik kedai tersebut beragama muslim, yang mana seharusnya paham dengan cara jual beli yang dianjurkan syariat islam. Oleh karena itu agama Islam telah member peraturan yang sebaik-baiknya agar peraturan tersebut menciptakan kemaslahatan manusia. Dengan ini penulis akan mengangkat penelitian skripsi yang berjudul, **Jual Beli Makanan Di Kedai TanpaPencantuman Harga Di Tinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Kedai Abdullah Goro Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo).**

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian lapangan yang sumber datanya diperoleh langsung. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Februari 2020 di Kedai Abdullah Goro Assalam. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dibutuhkan sebanyak 3 orang narasumber dari pelanggan dan 1 narasumber pemilik kedai untuk mendapatkan data yang akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan metode induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Jual Beli Makanan di Kedai Abdullah Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penjualan makanan di kedai Abdullah tanpa pencantuman harga adalah suatu transaksi jual beli dengan objek penjualannya adalah makanan yang harganya tidak dicantumkan oleh penjualnya melainkan bayar seikhlasnya. Kedai Abdullah merupakan kedai yang menggunakan konsep makan sepuasnya bayar seikhlasnya. Pelaksanaan jual beli yang dilakukan di kedai Abdullah di Kec. Kartasura Kab.Sukoharjo. Bisnis ialah kegiatan seorang individu yang tersusun secara organisir untuk menjual dan menghasilkan barang atau jasa, guna mendapatkan keuntungan yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau suatu lembaga. Adapun mengenai proses bagaimana penentu harga makanannya menurut pemilik kedai adalah Ikhlas, bayar dengan seikhlasnya dengan memasukkan uang kedalam kotak infaq yang telah disediakan.

Menurut penulis, system ini sangat lah bagus. Tetapi belum jelas hasilnya dan apakah merugikan penjual atau pembeli karena terkadang uang yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang dimakan atau uang yang dibayar melebihi dengan yang dimakan. Seharusnya, harga makanan tetap di cantumkan tetapi diserahkan kepada pembeli dengan cara bayar seikhlasnya, Karena supaya sebelumnya sudah ada takaran harga. Hal tersebut bertujuan guna menghindari hal-hal yang dikhawatirkan oleh penjual, serta menghindari resiko kerugian.

Menurut syara' kata bathil ialah dengan mengambil harta tanpa adanya pengganti dan tanpa keridhaan pemilik harta tersebut atau menafkahkan harta bukan pada jalan yang bermanfaat, maka masuk didalamnya adalah penipuan, jual-beli, lotre, dan menafkahkan harta di jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Kata binakum mengartikan bahwa harta dengan hukum haram biasanya menjadi dasar dari persengketaan dalam transaksi yang hartanya dimakan dengan orang yang memakannya. Karena sifat naluriah manusia yang masing-masing pihak ingin memiliki dan cenderung serakah pada harta. Maksud dari memakan ialah mengambil harta dengan berbagai macam cara. Kata makan

digunakan sebagai ungkapan karena cara ini yang banyak digunakan. Didalam Islam, ada batasan-batasan yang diberikan kepada para pebisnis sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada pihak yang dirugikan baik pihak pembeli maupun dari pihak penjual. Dalam hal ini yang utama adalah pemberian harga, prinsipnya adalah transaksi dilaksanakan dengan harga yang adil karena hal ini merupakan bentuk komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang bersifat menyeluruh guna menghindari kecurangan dalam penentuan harga dan sekaligus melindungi para masyarakat dari para pengusaha atau wirausaha. Dalam konsep penentuan harga pada jual-beli dinilai dari keadaan barang dan jumlah harga, namun apabila keduanya tidak diketahui, maka hukum dari perjanjian jual beli itu tidak sah, dikarenakan bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

3.2. Faktor yang Melatarbelakangi Tidak Adanya Pencantuman Harga di Kedai Abdullah

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi tidak adanya pencantuman harga pada menu makanannya dikarenakan beberapa hal, yaitu antara lain:

Kedai Abdullah menggunakan konsep bayar seikhlasnya. Yang bertujuan untuk memudahkan dan menolong para masyarakat yang tidak memiliki uang banyak bisa merasakan makan di kedai Abdullah serta mengajak para masyarakat, pembeli untuk belajar jujur, ikhlas dan sedekah.

Hal tersebut dapat dikatakan telah melakukan akad atau transaksi, ketika konsumen telah melakukan pengambilan menu makanan yang tersedia. Hal itu telah menunjukkan akad ijab qabul antara kedua belah pihak walau tanpa ucapan serah terima. Perkembangan modern seperti ini, banyak hal yang berubah jika dibandingkan dengan masa terdahulu. Dimasa sekarang fasilitas dan kemudahan yang sangat signifikan dan praktis diberikan kepada masyarakat. Masyarakat tidak kalah tanggap dan kreatif dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan adanya penetapan harga terlebih dahulu, maka akan menghilangkan beban ketika pembeli akan membayarnya. Agar ada takaran harga walaupun bayar dengan seikhlasnya. Produksi yang

merealisasikan kepentingan pribadi serta membahayakan kepentingan umum telah dilarang didalam Islam. Fiqih Islam menjelaskan bahwa, produsen-produsen tersebut tidak boleh berlaku semena-mena dalam menurunkan atau menaikkan harga dari harga berlaku dipasaran, karena berakibat kerugian pada pihak yang lain.

Kejelasan atas barang dan harga barang menjadi syarat dari objek jual beli. Dalam hal ini meliputi kualitas, jenis, ukuran, takaran, timbangan barang. Jelas dan transparan atas sesuatu yang perlu diketahui. Tujuan dari hal ini adalah menghindari kerugian setelah bertransaksi. Hal ini juga berlaku pada harga baik itu sifat (jenis pembayaran), maupun jumlahnya. Jika salah satu dari barang dan harga tidak diketahui atau keduanya tidak diketahui, maka jual beli dianggap batal, karena memiliki unsur penipuan.

3.3. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli di Kedai Abdullah

Jual beli yang dilakukan di Kedai Abdullah dengan tidak mencatumkan harga pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Quran dan Hadits yang menyebutkan hukum dari jual beli tersebut. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum dari kegiatan mu'amalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi: "Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya".

Sesuai kaidah fiqh tersebut, hukum jual beli pada umumnya tidak masalah, karena belum ada dalil yang mengharamkannya. Namun, dalam transaksi mu'amalah memiliki ketentuan rukun dan syarat yang perlu untuk dipenuhi sehingga akan berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Rukun dan syarat jual-beli telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya yang mana objek jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah, syarat objek barang yang diperjual belikan tercantum pada pasal 76 KHES huruf (e) Barang yang akan dijualbelikan harus diketahui pembeli. Hal ini dimaksudkan barang yang tidak diketahui oleh penjual dan pembeli, yakni mengenai kualitas, takaran, bentuk,

sifat dan harga barang. Bila dalam transaksinya harga barang tidak diketahui maka perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (gharar). Selanjutnya pada huruf (h) Sifat barang tersebut harus diketahui secara langsung oleh pembeli sehingga tidak perlu menjelaskannya secara lebih lanjut, maksudnya adalah harga makanan dicantumkan sehingga pembeli dapat mengetahui langsung mengenai harga makanan yang akan dibeli. Karenanya penjual harus mencantumkan harga makanan yang akan dijual. Pada huruf (i) barang yang akan dijualbelikan sesuai pada waktu akad ditentukan.

Secara kontekstual, peneliti menemukan kejanggalan dari jual beli yang dibahas. Namun, jual beli dalam Islam harus memiliki memastikan unsur telah terpenuhi unsur, yaitu suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam Qs An-nisa Ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (QS An-nisa Ayat 29).

Diterangkan pada ayat tersebut bahwa setiap transaksi jual beli, baiknya disertai perasaan suka sama suka, tidak terdapat unsur paksaan. Sesuai KHES pasal 21 huruf (a) pelaksanaan akad berdasarkan asas ikhtiyari/sukarela yaitu setiap akad dilaksanakan atas kehendak pihak terkait, terhindar dari adanya tekanan atau keterpaksaan dari satu pihak atau pihak lain.

Selain itu, bila kita menjadikan jual beli dalam pandangan tukar menukar, maka tukar menukar harta dengan pihak yang satu memberikan imbalan (uang) untuk dapat berpindah kepemilikan, dan pihak yang lainnya menerima uang sebagai imbalan, dan merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang memiliki hakikat saling tolong menolong antar manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari’at Islam. Kompilasi hukum ekonomi syariah memberikan aturan sebagai batasan yang membatasi ruang lingkup jual beli tersebut,

khususnya yang terkait dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh Allah. Allah menghalalkan jual beli yang terdapat hubungan timbal balik antar manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya secara benar. Allah juga melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.

Suatu jual beli bisa saja tidak sah bila tidak terdapat ikatan yang disebut ijab dan qabul, yakni berupa ucapan atau kesepakatan yang dilakukan antara keduanya yang mengadakan transaksi. Dan belum dikatakan sah jual beli tersebut sebelum mengucapkan ijab dan qabul terlaksana, karena adanya ijab dan qabul menunjukkan sikap rela atau suka sama suka yang ada pada pihak-pihak terkait baik berupa ucapan lisan maupun dengan tulisan dengan syarat kedua pihak mengerti maksud akad tersebut. Transaksi tersebut di anggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen pasal (7) dijelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha ialah memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur, berkaitan kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta member keterangan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang tersebut. Penyandaran pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan pada sahnya pelaksanaan jual beli ialah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Rukun-rukun tersebut tercantum pada pasal 56 KHES ada tiga, yaitu pihak-pihak, objek dan kesepakatan.

Rukun yang terpenting dalam jual beli adalah akad. Sebab dari sudut pandang itulah sebuah akad akan tercapai pada kesepakatan dari kedua pihak yang melaksanakan transaksi. Akad jual beli makanan ini tidak jauh beda dengan jual beli yang lain, namun perlu di ingat, akad yang terjadi harus jelas, artinya tidak terdapat keraguan (samar) di antara keduanya. Apabila terdapat unsur ketidakpastian dalam menentukan harga pada jual beli ini maka akan timbul makna Juhala yang berarti suatu unsur yang tidak jelas pada kualitas dan

kuantitas atau harga suatu barang, dan akan berdampak pada ketidakpastian. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.

Sedangkan dalam pelaksanaannya, dikarenakan tidak adanya pencantuman atau penetapan harga dalam setiap menu makanannya, maka menurut salah satu pelanggan di Kedai Abdullah yakni Mba Ulayya Almast bahwa jual beli di Kedai Abdullah ini mengalami sedikit kejanggalan, dikarenakan penentuan harganya tidak langsung secara terbuka, melainkan membayar dengan cara bayar seikhlasnya. Tetapi menurut mba Ulayya, kejanggalan tersebut tidak menjadikan untuk jual beli tersebut harus dilarang, Karena tidak akan menimbulkan perselisihan dan bahkan mengajarkan rasa ikhlas dan cara bersodaqoh.

Dalam ekonomi Islam siapa pun diperbolehkan berbisnis. Namun, orang yang melaksanakan bisnis tidak boleh melakukan ikhtikar, yakni mengambil keuntungan diatas keuntungan normal atau yang tidak wajar dan sampai membebani para pembeli. Rasulullah SAW menegaskan bahwa jual beli itu harus saling menguntungkan bukan merugikan ataupun membebani. Pada dasarnya selama tidak menimbulkan perselisihan atau pertengkaran pada pihak-pihak terkait maka jual beli itu boleh dan tetap sah, yang tidak diperbolehkan yakni jual beli yang barangnya tidak jelas (majhul), tidak jelas batas waktunya dan tidak jelas keberadaannya. Karena dapat menyebabkan perselisihan, jual beli ini biasanya dilakukan di zaman jahiliyah.

Di dalam KHES kita bisa mendapati akad jual beli yang sah, fasad, dan batal. Salah satu akad yang batal yaitu mengandung unsur ghubn atau penyamaran. Jika dilihat dari menu makanannya yang tidak dicantumkan harga tersebut, maka di lihat dan diketahui bahwa jual beli tersebut di larang, karena kesamaran harganya (mengandung kesamaran). Seperti yang telah disebutkan dalam KHES pasal 29, yaitu: Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath

atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.

Dari pasal diatas sudah jelas diterangkan bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsure kesamaran adalah tidak diperbolehkan atau di larang, karena dapat menimbulkan adanya penipuan, dan jual beli yang seperti itulah di larang. Syarat mengenai kesepakatan penjual dan pembeli di terangkan di dalam pasal 62 KHES sebagai berikut: Penjual dan pembeli harus dan wajib menyepakati nilai objekjual beli yang diwujudkan dalam harga.

Mengenai asas yang menguntungkan dalam KHES dimana akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga dapat menghindari penipuan atau manipuasi. Para penjual dan pembeli tidak begitu memperhatikan adanya sighat dalam jual beli, padahal sighat merupakan salah satu dari rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat untuk melakukan jual beli tanpa sighat dan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya. Syaratnya adalah sesuatu itu berlaku untuk umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik dalam bentuk praktek maupun dalam perkataan.

Pada pasal 78 KHES yang berbunyi beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad dalam huruf (a) dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan. Dan dalam pasal 81 KHES ayat (5) penyerahan memperhatikan kebiasaan dan kepatutan yang ada pada masyarakat. Hal ini tidak menyebabkan batalnya jual beli, karena transaksi itu merupakan suatu trend kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dihindari, maka hal itu diperbolehkan namun tidak sampai melanggar syari'at Islam. Akad harus dilakukan dengan saling ridho, saling member kemudahan dan tidak merugikan salah satu pihak. Agar akad berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan.

4. PENUTUP

Kesimpulan penelitian ini adalah: Pelaksanaan jual beli makanan di Kedai Abdullah GoroA Assalam Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo yaitu para pelanggan yang datang dipersilakan untuk makan sesuai porsi yang cukup bagi pelanggan. Kemudian setelah selesai, pelanggan langsung menuju kotak infaq yang telah disediakan untuk membayar makanan yang sudah dimakan. Nominal pembayaran harga makanan hanyalah sesuai dengan keikhlasan pelanggan, karena tidak ada harga khusus yang ditetapkan oleh penjual.

Faktor yang melatar belakangi kedai sehingga tidak mencantumkan harga dalam menu makanan adalah karena bertujuan untuk memudahkan dan menolong para masyarakat yang tidak memiliki uang banyak bisa merasakan makan di kedai Abdullah serta mengajak para masyarakat, pembeli untuk belajar jujur, ikhlas dan bersedekah.

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli di Kedai Abdullah adalah bahwasanya Kedai Abdullah telah memenuhi syarat berupa terhindar dari gharar sehingga diketahui dengan pasti oleh pembelinya. Dan juga mengenai ketidakjelasan harga yang dapat berpotensi menjadi penipuan tidak dicurigai oleh masyarakat setempat karena kebiasaan, maka system yang dijalankan oleh Kedai Abdullah masih dapat berjalan apabila di tinjau dari KHES.

Penulis juga menyarankan bahwasanya: Pencantuman harga hendaknya harus dilakukan, agar menjadi patokan untuk membayar walaupun di Kedai tersebut pembayarannya dengan cara bayar seikhlasnya. Setidaknya harga dicantumkan supaya tidak ada kerugian dan kekecewaan di salah satu pihak. Bagi masyarakat agar bisa memberikan pembayaran lebih dari kebaikan yang dilakukan oleh Kedai Abdullah. Bagi peneliti, dapat dilakukan dan dikembangkan ke dalam penelitian lebih lanjut dimana terdapat problem akademik yang diteliti lebih mendalam. Jika niat bersedekah, maka transparansi pendapatan harus dicantumkan. Agar para pelanggan juga mengetahui. Sebaiknya, nama Panti Asuhan yang menerima dana hibah di cantumkan di kedai serta dokumentasi penyerahan dana dan kegiatan. Sebagai transparansi

penyaluran dana kepada pengunjung agar dapat menambah kepercayaan konsumen. Jika ingin bersedekah, sebaiknya kata jual beli diganti dengan kata donasi. Sedekah yang baik adalah sedekah yang sembunyi-sembunyi. Jika berniat sedekah, sebaiknya kasir tetap diadakan lalu ditambah dengan adanya kotak infaq.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2008. *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokus Media.
- At-Tuwaijiri, Syaikh Muhammad. 2009. *Ensiklopedia Islam al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Griya Media.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ja'far, Khumaedi. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan
- Lubis, Suhrawadi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung RI. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Fokus Media
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mustafa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nor, Dumairi. 2008. *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*. Sidogiri: Pustaka Sidogiri.
- Rahmawati, Eka Nuraini. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih". *Jurnal AL 'ADALAH*. 2015. Vol XII No. 4.

- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqh Sunnah Jilid 12*. Bandung: Al-Ma'arif
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. 2015. Vol. 3 No. 2.
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sulaiman Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqh Muammalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim BIP. 2017. *Penjelasan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Jual Beli*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Utomo, Setiawan Budi. Setiawan Budi. 2003. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wiranta, Sujarweni. 2014. *Metedologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.